

Analisis pelaksanaan kebijakan pemeriksaan pajak hotel dan restoran (PHR) pada suku dinas pendapatan daerah Kotamadya Jakarta Utara

Ahmad Maulana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20442726&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan pemeriksaan pajak hotel dan restoran (PHR) pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara dengan pendekatan studi korelasional. Fokus penelitian diarahkan pada analisis hubungan atau pengaruh pemeriksaan pajak (variabel bebas) terhadap penerimaan pajak dan wajib pajak (variabel terikat).

Hasil analisis data atas data-data sekunder yang diperoleh dan Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan t-test menunjukkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Kondisi pemeriksaan pajak, penerimaan pajak dan wajib pajak PHR Suku Dinas Pendapatan Kotamadya Jakarta Utara cenderung fluktuatif dan menunjukkan pergerakan yang linier.
2. Antara kebijakan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan, dengan tingkat hubungan tergolong kuat (0.657) dan memberikan kontribusi sebesar 43.1%.
3. Antara kebijakan pemeriksaan pajak dengan wajib pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan, dengan tingkat hubungan tergolong kuat (0.744) dan memberikan kontribusi sebesar 55.3%.

Dari temuan-temuan penelitian tersebut disarankan tiga hal penting, yakni:

1. Kebijakan pemeriksaan pajak dalam hal jumlah pemeriksa pajak hendaknya ditambah atau ditingkatkan dan tahun ke tahun secara proporsional sesuai dengan potensi pajak yang diperkirakan dapat dihimpun karena jumlah pemeriksa pajak ternyata memberikan

kontribusi positif yang cukup signifikan bagi peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak PHR. Namun, selain itu, untuk meningkatkan profesionalisme aparat pemeriksa diperlukan pula training atau workshop mengenai pemeriksaan secara rutin dan berkala.

2. Oleh karena pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana dalam implementasinya memunculkan sejumlah masalah (implikasi) yang tidak menguntungkan bagi pemungutan pajak hotel dan restoran maka eksistensinya perlu ditinjau kembali atau paling tidak ditata kembali dan kemudian hasilnya dikukuhkan ke dalam Perda. ini penting dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum dan pelaksanaan pemeriksaan yang lebih elegan, efektif dan efisien.

3. Sebagai tindak lanjut akademik atas hasil penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan yang secara spesifik berusaha mengkaji pengaruh peningkatan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak PHR.